

Kajian Bentuk Dasar Permukiman Kumuh Pada Kawasan Pusat Perkotaan Kabupaten Kutai Kartanegara

Lisa Astria Milasari

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email: lisaastria71@gmail.com

Artikel Informasi

Riwayat Artikel

Diterima, 15/01/2021

Direvisi, 02/02/2021

Disetujui, 23/03/2021

Kata Kunci:

Kajian;

Permukiman Kumuh;

Kawasan

ABSTRAK

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peningkatan fisik yang cepat. Hal ini menimbulkan adanya spot-spot area permukiman kumuh. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan delienasi kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Kutai Kartanegara secara spatial kawasan serta bentuk dasar permukiman kumuh pada lokasi studi sebagai acuan tipologi dalam pembangunan berkelanjutan. Pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan rasionalistik karena penelitian ini didasarkan pada kebenaran yang didapatkan melalui fakta empirik. Berdasarkan analisis yang di dapat yaitu untuk delienasi kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu seluas 13,29 Ha dengan pembagian Desa Loa Kulu Kota memiliki luas kumuh 3,79 Ha, Desa Loh Sumber memiliki luas kumuh 5,31 Ha dan Desa Jembayan memiliki luas kumuh 4,19 Ha. Analisis bentuk dasar permukiman kumuh pada ketiga lokasi Desa bervariasi, yakni Desa Loa Kulu kota dan Desa Jembayan memiliki bentuk dasar empat persegi panjang yang dipengaruhi oleh pertumbuhan yang cenderung mengelompok, sedangkan pada Desa Loh Sumber memiliki bentuk dasar pita (memanjang), dipengaruhi oleh faktor tingkat pendapatan yang rendah.

ABSTRACT

The area of Kutai Kartanegara Regency has a rapid physical improvement. This has resulted in the existence of slum area spots. The purpose of this research is to determine the development of urban slum settlements in Kutai Kartanegara Regency spatially and the basic forms of slum settlements in the study location as a typological reference in sustainable development. The approach taken is a rationalistic approach because this research is based on the truth obtained through empirical facts. Based on the analysis obtained, namely for the development of urban slum areas in Kutai Kartanegara Regency which is an area of 13.29 hectares with the division of Loa Kulu Kota Village which has a slum area of 3.79 hectares, Loh Sumber Village has a slum area of 5.31 hectares and Jembayan Village has slum area 4.19 Ha. The analysis of the basic form of slum settlements at the three village locations varies, namely Loa Kulu kota village and Jembayan village which have a basic rectangular shape which is influenced by growth that tends to be clustered, whereas in Loh Sumber Village it has a basic band shape (elongated), influenced by level factors. low income.

Keywords:

Study;

Slums;

Region



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Penulis Korespondensi:

Lisa Astria Milasari

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email: lisaastria71@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan kota pada awalnya berupa permukiman skala kecil, dengan berisikan pertumbuhan penduduk, perubahan sosial ekonomi serta interaksi dengan kota-kota lain. Salah satu masalah yang hampir dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia yaitu tidak terkontrolnya tingkat urbanisasi. Sehingga dampak dari fenomena ini adalah munculnya berbagai masalah seperti kemiskinan perkotaan, kepadatan penduduk yang tidak terkendali dan munculnya kawasan permukiman kumuh.

Dalam Undang- Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengenai pengertian dasar permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan perkembangan fisiknya saat ini menunjukkan perkembangan cepat. Fenomena ini terlihat dari perkembangan perumahan, pertokoan, bangunan umum dan sarana prasarana yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan fungsi lahan menjadi terbangun berupa permukiman kumuh tidak hanya memberikan efek visual yang buruk, juga memberikan kontribusi yang tidak baik bagi perkembangan fisik kota secara umum serta hanya membantu penduduk untuk sekedar tinggal tanpa memberikan dampak sosial maupun ekonomi yang positif.

Di sisi lain, pada bidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya golongan masyarakat berpenghasilan rendah, penggunaan fungsi ruang berubah menjadi fungsi permukiman, seperti munculnya kantong-kantong permukiman pada lahan tidak sesuai peruntukkan (*squatters*), tingkat kepadatan tinggi, kualitas bangunan, kualitas sarana dan prasana yang saat ini belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) perkotaan.

Mengacu pada Undang –Undang No.1 Tahun 2011, upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh pada dasarnya meliputi tahapan utama yakni pendataan, penetapan lokasi, pelaksanaan dan pengelolaan. Selanjutnya diatur dalam Permen PUPR NO.2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menyatakan bahwa kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi ke kumuhkan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Identifikasi pada kawasan kumuh didasarkan dari Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016, dimana identifikasi permasalahan kumuh merupakan tahap identifikasi untuk menentukan permasalahan kekumuhan pada obyek kajian yang difokuskan pada aspek kualitas fisik bangunan, aspek non fisik, dan aspek legalitas lahan pada kegiatan studi.

Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengkaji karakteristik permukiman kumuh di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sasaran penelitian yakni menentukan delienasi kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Kutai Kartanegara secara spatial kawasan serta bentuk dasar permukiman kumuh pada lokasi studi sebagai acuan tipologi dalam pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis, penggunaan lahan permukiman dan non permukiman di Kecamatan Loa Kulu kota yang terdapat permukiman kumuh, yaitu ± 21.171 hektar dan berlokasi pada pusat – pusat kegiatan. Untuk persebaran lokasi permukiman kumuh berada di prioritaskan pada kawasan pusat perkotaan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada wilayah kawasan pusat perkotaan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu berada di lokasi Desa Loa Kulu Kota, Desa Jembayan dan Desa Loh Sumber.

Permukiman Kumuh yang terdapat di Kawasan Perkotaan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas yang bervariasi. Untuk Desa Loa Kulu Kota memiliki luasan 14.437 Ha, dengan Jumlah penduduk Desa Loa Kulu pada bulan Juni Tahun 2020 (Semester I) tercatat berjumlah 7.599 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3.886 jiwa dan perempuan 3.713 jiwa. Jumlah penduduk terbesar ada di RT 19 dan terkecil ada di RT 22. Kepadatan penduduk rata-rata yakni 49 jiwa/Km.



Gambar 2. Salah satu permukiman di Desa Loa Kulu (Gg.Usuf RT.05), Sumber : hasil visualisasi, 2020

Untuk Desa Loh Sumber dengan luas wilayah 1.752 Ha/m², yang terdiri lahan basah seluas 277 Ha, lahan kering ebum 498 Ha, lahan pekarangan 140 Ha, dan permukiman 4 Ha. Kondisi penduduk di Desa Loh Sumber berjumlah yaitu 3.608 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1826 jiwa dan perempuan 1783 jiwa. Untuk jumlah penduduk terbesar di RT 2 yakni 152 jiwa dan jumlah penduduk terkecil yakni di RT 6 dengan jumlah 508 jiwa.



Gambar 3. Salah satu permukiman dan pekarangan permukiman di Desa Loh Sumber, Sumber : hasil visualisasi, 2020

Sedangkan untuk Desa Jembayan memiliki luas 170,78 Km² dengan rukun tetangga berjumlah 23 RT. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pada Jumlah penduduk pada Desa Jembayan yakni 9.334 jiwa yang terdiri dari laki-laki 4.836 jiwa dan perempuan 4.498 jiwa. Dengan jumlah RT sebanyak 23 RT dan 2.697 KK.



Gambar 4. Salah satu permukiman dan perkarangan permukiman di Desa Loh Sumber, Sumber : hasil visualisasi, 2020

Delienasi Permukiman Kumuh

Dalam menentukan luasan permukiman kumuh sebagai delienasi kawasan kumuh perkotaan yaitu dikarenakan

1. Kesamaan karakteristik/tipologi kumuh
2. Lokasi dengan jarak berdekatan
3. Pembentukan/jaringan infrastruktur yang tidak dapat ditangani dalam bentuk spot-spot kumuh
4. Syarat Luas SK. Bupati mengenai kawasan permukiman kumuh dengan ketentuan range antara 10-15 Ha.

Permukiman kumuh yang terdapat di pusat perkotaan memiliki luas bervariasi. Luas kumuh terbesar yaitu Desa Loh Sumber dan luas kumuh terendah yaitu berada di Desa Loa Kulu Kota. Berikut tabel penjelasan luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan.

Tabel 1. Delienasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

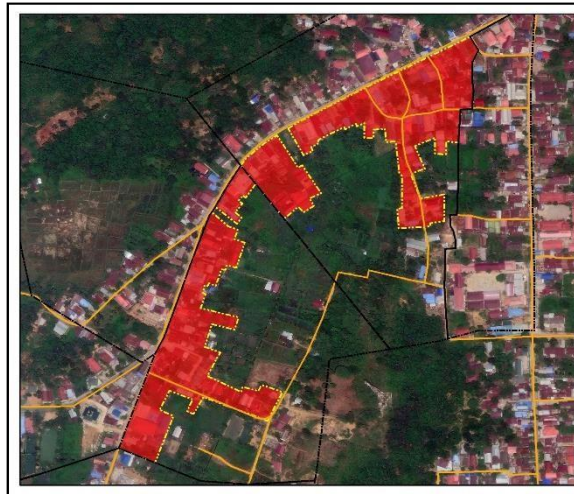
Desa	Luas Kumuh
Loa Kulu	3,79
Loh Sumber	5,31
Jembayan	4,19
Total	13,29

Untuk desa loa kulu kota pada luasan permukiman kumuh yakni berada di RT 8, RT 9, dan RT 10, berikut gambar 5. peta delienasi kawasan permukiman kumuh di Desa Loa Kulu Kota.



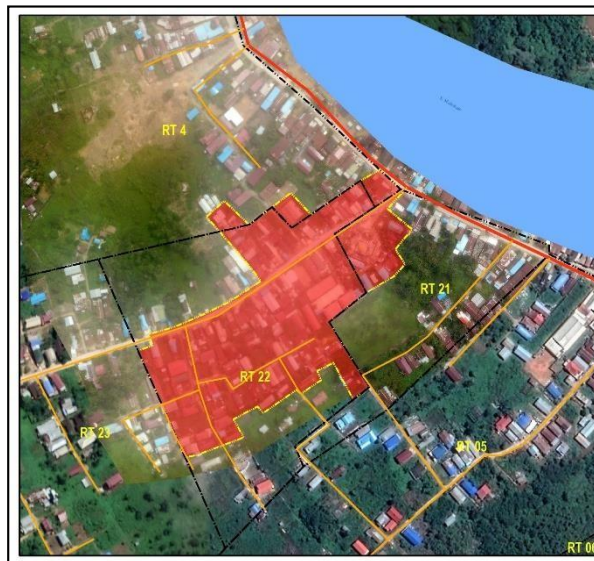
Gambar 5. Delienasi Kawasan di Desa Loa Kulu Kota Sumber : hasil analisis, 2020

Untuk desa loh sumber pada luasan permukiman kumuh yakni berada di RT 2 dan RT.3, berikut gambar 6. peta delienasi kawasan permukiman kumuh di Desa Loh Sumber.



Gambar 6. Delienasi Kawasan di Desa Loh Sumber Sumber : hasil analisis, 2020

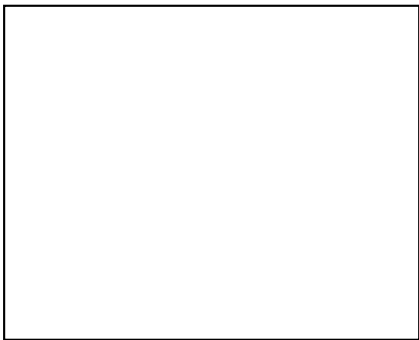
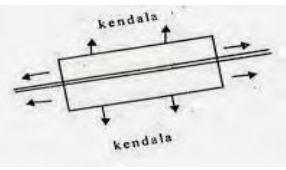
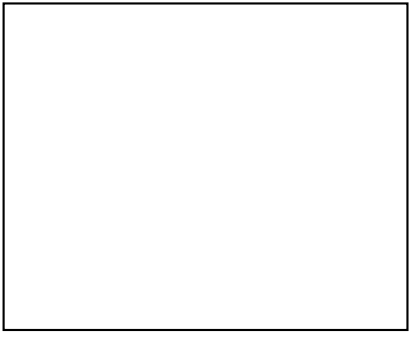
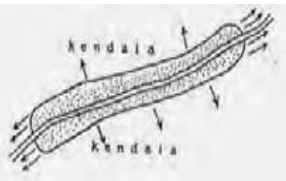
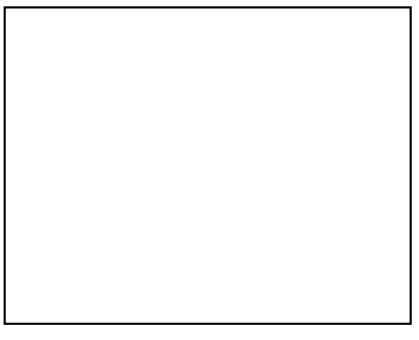
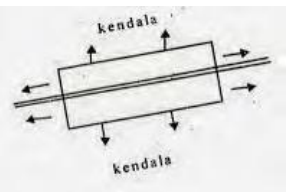
Untuk desa Jembayan pada luasan permukiman kumuh yakni berada di RT 4, RT 21, dan RT 22, berikut gambar 7. Peta delienasi kawasan permukiman kumuh di Desa Jembayan.



Gambar 7. Delienasi Kawasan di Desa Loa Kulu Kota Sumber : hasil analisis, 2020

Bentuk Dasar Permukiman Kumuh

Pengidentifikasi bentuk dasar dilakukan dengan melakukan pengamatan dan analisis pada peta dengan menggunakan GIS (*Geographic Information Sistem*). Pada wilayah penelitian hanya teridentifikasi 3 bentuk dasar permukiman kumuh yaitu tidak berpola, bujur sangkar, dan pita. Secara umum, area-area tersebut memiliki permukiman kumuh dengan bentuk dasar empat persegi panjang (*the rectangular cities*). Permukiman kumuh di kecamatan ini memiliki dimensi memanjang yang lebih besar daripada dimensi melebar. Rumah-rumah kumuh pada area-area tersebut kemudian membentuk koloni permukiman kumuh dengan bentuk bujur sangkar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut.

No	Area Kumuh	Gambar Pada Peta	Bentuk yang mendekati	Bentuk dasar
1	Desa Loa Kulu Kota (RT 8, RT 9 dan RT 10)			Empat Persegi Panjang
2	Desa Loh Sumber (RT 2 dan RT 3)			Pita
3	Desa Jembayan (RT 4, RT 21 dan RT 22)			Empat Persegi Panjang

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 area kawasan permukiman kumuh perkotaan memiliki bentuk empat persegi panjang (*the rectangular cities*) yaitu Desa Loa Kulu Kota dan Desa Jembayan. Permukiman kumuh di area ini memiliki dimensi memanjang yang lebih besar daripada dimensi melebar.

Permukiman kumuh pada area-areaini terdapat di dalam perkampungan yang terletak di dekat jalur kereta api. Rumah- rumah tersebut membentuk koloni yang memiliki bentuk empat persegi panjang. Sedangkan 1 area kumuh memiliki bentuk pita (*ribbon shaped cities*), yaitu area Desa Loh Sumber. Bentuk pita memiliki dimensi memanjang yang jauh lebih besar daripada dimensi melebar. Peranan jalur transportasi yang memanjang mempengaruhi terciptanya bentuk pita.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa :

1. Untuk Delienasi kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu seluas 13,29 Ha dengan pembagian Desa Loa Kulu Kota (RT.8, RT 9, dan RT. 10) memiliki luas kumuh 3,79 Ha, Desa Loh Sumber (RT.2 & RT.3) memiliki luas kumuh 5,31 Ha dan Desa Jembayan (RT.4, RT 21 & RT 22) memiliki luas kumuh 4,19 Ha.
2. Bentuk dasar permukiman kumuh pada ketiga lokasi Desa bervariasi, yakni Desa Loa Kulu kota dan Desa Jembayan memiliki bentuk dasar empat persegi panjang yang dipengaruhi oleh pertumbuhan yang cenderung mengelompok, sedangkan pada Desa Loh Sumber memiliki bentuk dasar pita (memanjang), dipengaruhi oleh faktor tingkat pendapatan yang rendah.

SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk keperluan penelitian yang akan datang adalah perlu adanya penelitian lanjutan dalam pengaruh pusat perkotaan terhadap kawasan permukiman kumuh perkotaan dari aspek stakeholder. Selain itu dapat dilanjutkan dalam membuat arahan ataupun konsep penanganan permukiman kumuh pusat perkotaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darda, Aji M. 2009. *Karakteristik Permukiman di Wilayah Pinggiran Kota Jakarta Tahun 1991-2007 (Studi Kasus: Kecamatan Pamulang dan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan)*. Depok: Universitas Indonesia. Skripsi.
- Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press.
- Frizal, Yohannes. 2011. *Tipologi Bangunan Tua*. University of Riau. Volume III, Nomor 2, Halaman 33-42, Juli 2011.
- Handayani, Dewi et. al. 2005. *Pemanfaatan Analisis Spasial untuk Pengolahan Data Spasial Sistem Informasi Geografi Studi Kasus: Kabupaten Pemalang*. Semarang: Universitas Stikubank. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Volume X, No. 2 Mei 2005 : 108-116.
- Komarudin. 1999. *Pembangunan Perkotaan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.
- Kuswartojo, Tjuk. 2005. *Perumahan dan Permukiman Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB.
- Masyhuri dan Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Undang-Undang No. 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman di Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.